

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Menurut kamus Bahasa Indonesia Kata pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mendapat imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Martinus Jan Langeveld, pendidikan ialah upaya untuk membantu peserta didik agar mereka mampu mengerjakan tugas kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab secara oral dan susila. Dalam hal ini, pendidikan juga diartikan sebagai upaya untuk membangun anak agar lebih dewasa. Pendidikan pertama kali dapat diperoleh oleh manusia melalui keluarga sebagai pendidikan informal yang kemudian dilanjutkan dengan pendidikan di dalam sekolah sebagai pendidikan formal dan pada lingkungan masyarakat. Proses pendidikan berlangsung selama seumur hidup sehingga peranan keluarga dan lingkungan sebagai tempat pendidikan pertama sangat penting. Pendidikan itu juga berusaha untuk mengembangkan potensi-potensi manusia yang utuh (Anwar, 2015) oleh sebab itu manusia tidak dapat terlepas dari lingkungannya, hal inilah yang menyebabkan kenapa manusia sangat berkaitan erat dengan lingkungan.

Bagi sebuah negara, pendidikan merupakan salah satu hal krusial, karena pendidikan adalah sebuah hak warga negara seperti halnya Republik Indonesia yang

mementingkan pendidikan sesuai dengan yang tertulis pada UUD 1945, yakni Hak mendapatkan pendidikan tercantum dalam Pasal 28C Ayat 1 “ Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.” Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” dan juga yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat yang berbunyi “untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi bangsa dan negara ini mendorong pemerintah berupaya mewujudkan hak bagi setiap warga negara untuk dalam memperoleh pendidikan secara layak. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 agustus 1945, bangsa Indonesia melakukan banyak perubahan tidak hanya dalam bidang pemerintahan saja, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam pendidikan merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu perubahan menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita suatu bangsa yang merdeka dan negara yang ingin berdiri sendiri (Rifa'i, 2016).

Sebagai sebuah negara yang terus berupaya dalam membangun sumber daya manusia, bangsa Indonesia bekerja keras membangun pendidikan yang umumnya masih rendah. Rata-rata 40 sampai 100 penduduk usia 10 tahun keatas tidak bisa membaca dan menulis pada saat memulai repelita I tahun 1969 (--, 1994)

Pemerintah terus berupaya dengan melakukan pembangunan-pembangunan khususnya dibidang pendidikan dan kebudayaan, hal ini dapat dilihat bahwa pada Pembangunan Lima Tahun III masih dititik beratkan pada sektor pendidikan yang nantinya menghasilkan sumber daya manusia yang terdidik sehingga mampu membuat kemajuan-kemajuan bagi negaranya. Perkembangan zaman yang semakin maju mendorong setiap individu untuk meningkat kualitas dirinya dalam bersaing dan meningkatkan sumber daya manusia merupakan bagian dari upaya melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan nasional.

Pada tahun 1984, pemerintah mencanangkan gerakan wajib belajar pendidikan dasar (WAJARDIKDAS) 6 tahun. Hal ini disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam pidato sambutan peresmian wajib belajar. Presiden Soeharto menyatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh anak Indonesia berusia 7-12 tahun untuk menikmati pendidikan dasar secara merata di seluruh tanah air.

Upacara pencanangan rencana ini dilakukan secara besar-besaran di Stadion Utama Senayan (kini Stadion Utama Bung Karno), Jakarta. Gerakan ini membawa hasil yang memuaskan bahwa setiap tahunnya jumlah lulusan SD semakin meningkat bersamaan dengan ditetapkannya UU No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional yang di dalamnya memuat Pasal 14 Ayat (2) yang mewajibkan anak berumur 7 tahun ke atas wajib menyelesaikan pendidikan dasar yang diharapkan tuntas pada tahun 1994 (Pendidikan Sejarah & Ilmu Sosial, 2013). Keberhasilan program wajib belajar enam tahun di tandai dengkenaikan angka partisipasi sekolah dasar (SD) sebesar 1,4%. Kemudian angka partisipasi itu

meningkat menjadi 89,91% diakhir Pelita IV. Kenaikan angka tersebut membuat pemerintah percaya diri untuk memperluas kelompok usia anak yang mengikuti program wajib belajar selanjutnya menjadi 7-15 tahun, atau tamat sekolah menengah pertama (M.Sanusi, 2014).

Sepuluh tahun sejak program wajib belajar enam tahun tuntas ditahun 1994, pemerintah merancang program lanjutan sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan Indonesia, yakni program wajib belajar sembilan tahun yang direncanakan tuntas pada 2004. Alasan paling utama yang mendasari pemerintah mencanangkan wajib belajar 9 tahun adalah adanya deklarasi bersama “Education for All” di Jom Tien pada 1990 menetapkan fungsi pendidikan dasar yang wajib untuk semua warga negara adalah agar peserta didik dapat menjadi anggota masyarakat yang dapat bertahan hidup, mengembangkan potensi diri, berpartisipasi dalam masyarakat, memperoleh pekerjaan, dan belajar sepanjang hayat (Soedijarto, 2008).

Upaya pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun pada kelompok usia 7-15 tahun dimulai saat diresmikannya pencanangan wajib belajar pendidikan dasar pada mei 1994. Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden No.1 tahun 1994. Pelaksanaan ini semua demi tercapainya kebijaksanaan pemerataan pembangunan, khususnya pemerataan untuk memperoleh pendidikan terutama di daerah- daerah terpencil di seluruh pelosok negeri Indonesia (--, 1985). Program wajib belajar sembilan tahun diharapkan selesai pada tahun 2004. Hal itu dilakukan agar bangsa Indonesia lebih siap menghadapi pasar global, baik pasar bebas AFTA

(Asean Free Trade Area) tahun 2003 maupun APEC (Asia Pasific Economic Cooperation) tahun 2010 (H.A.R Tilaar, 2000).

Alasan paling utama yang mendasari pemerintah mencanangkan wajib belajar sembilan tahun adalah adanya deklarasi bersama “Education for All” di Jom Tien pada 1990 menetapkan fungsi pendidikan dasar yang wajib untuk semua warga negara adalah agar peserta didik dapat menjadi anggota masyarakat yang dapat bertahan hidup, mengembangkan potensi diri, berpartisipasi dalam masyarakat, memperoleh pekerjaan, dan belajar sepanjang hayat (Soedijarto, 2008) . Presiden Soeharto dalam sambutannya membuka Konferensi Ke-29 Dewan Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara (SEAMEO) di Istana Negara Jakarta mengatakan bahwa wajib belajar 9 tahun dapat diperpanjang menjadi 12 tahun karena ini merupakan pelaksanaan dari amanat pendahulu bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia (Abrar, 2017).

Hal ini juga beriringan dengan banyaknya anak-anak yang tidak dapat mengikuti sekolah dengan berbagai kendala. Banyak penduduk Indonesia yang belum menikmati pendidikan, hal tersebut dikarenakan belum terjangkaunya tempat tinggal mereka (Sastrosupono. M, 1950). Hal-hal tersebut juga dampak dari akibat politik di Indonesia yang kian memanas, keadaan politik pemerintahan menjelang pemilu membuat beberapa masyarakat seperti kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah ditambah efek dari elnino mengakitatnya beberapa wilayah mengalami gagal panen, sehingga masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan

dasar untuk bertahan hidup dari pada memikirkan pendidikan mereka untuk masyarakat pada kelas miskin (M. C. Ricklefs, 2008). Jika diperhatikan lagi, walaupun program gerakan wajib belajar enam tahun terbilang sukses masih banyak jumlah anak usia wajib belajar 6 tahun yang belum dapat mengikuti ataupun melanjutkan pendidikannya karena kondisi ekonomi keluarga yang rendah. Program gerakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun akan mengakibatkan semakin besarnya jumlah anak yang wajib mengikuti pendidikan dasar.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi latar belakang setiap individu belum mendapatkan pendidikan wajib belajar enam tahun atau bahkan sembilan tahun dapat dilihat pada kondisi geografis wilayah misalnya, Indonesia sebagai negara kepulauan menyulitkan penyebarluasan jangkauan pelayanan pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan sehingga belum mampu menampung jumlah anak-anak usia sekolah yang ada, kurangnya tenaga guru dan masih adanya keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan adanya kondisi yang seperti itu bisa dibayangkan keadaan perekonomian masyarakat Indonesia tentu saja lebih berpusat pada masalah pangan dan bekerja untuk sesuap nasi demi mempertahankan hidup.

Pada tahun 1994 menurut data Badan Pusat Statistik RI, angka buta huruf di Indonesia mencapai 36,06%. Menurut catatan departemen sosial, sampai tahun 1996, masih ada sekitar 5.919,290 anak usia sekolah di seluruh Indonesia yang rawan putus sekolah karena kesulitan biaya. Hasil survei sosial ekonomi nasional pada tahun 2003, yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik menyebutkan data tahun 1997 terdapat 68% , masyarakat tidak bersekolah akibat krisis yang melanda

Indonesia dan tahun 1998-1999 menunjukkan bahwa terjadi angka peningkatan putus sekolah pada jenjang sekolah dasar (SD) sebesar 5,7% dari yang sebelumnya 2,6 % dan Badan Pusat Statistik pada Jakarta Dalam Angka pada tahun 1993 menyebutkan data kependudukan usia 10-14 tahun sebanyak 933.664 jiwa, hanya sekitar 58,95% yang bersekolah pada tingkat sekolah dasar (SD), 3,35% pada sekolah menengah pertama (SMP), dan sekitar 4,77% memilih tidak bersekolah, pada data pendidikan usia 10-19 tahun sekitar 0,80% penduduk masih mengalami buta huruf.

Pemerintah Indonesia menyadari permasalahan ini harus segera diatasi agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan agar anak-anak usia sekolah dapat mengikuti pendidikan secara berkesinambungan. Untuk itu diperlukannya kepedulian, dukungan dan peranserta masyarakat mempercepat penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun agar manfaatkan sumber daya manusia terutama dibidang ekonomi yang nanti mampu memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi secara luas. Pendidikan juga mampu memberikan kematangan untuk menguasai pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang akan meningkatkan kesejahteraan. Untuk menunjang usaha pemerintah dalam membantu menurunkan angka putus sekolah diterbitkannya Surat keputusan Bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 34/HUK/1996, Nomor 88 Tahun 1996, Nomor 0129/U/1996, Nomor 195 Tahun 1996 tentang Bantuan Terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat, dan Anak yang Bertempat Tinggal di Daerah Terpencil dalam rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Hal ini menjadi titik

awal peresmian dan pemasyarakatan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 1996 di Semarang (Pidato Presiden Soeharto, sekretariat negara 1966-1997. 1299).

Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) diharapkan dapat menjadi sebuah gerakan massal dimana peran serta masyarakat dalam membantu anak-anak yang rawan putus sekolah dalam terbantuan untuk itu dalam sebuah gerakan perlu adanya keseriusan dalam mengatur dan mengelola gerakan ini agar sampai kepada masyarakat luas. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memberantas buta huruf dan menjadikan pendidikan dasar 9 tahun didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, pada 29 Mei 1996 dalam pidatonya pada Temu Koordinasi Gerakan Nasional Orang Tua Asuh pada tanggal 30 Agustus di Istana Negara, Presiden Soeharto menyampaikan :

“pada tanggal 29 Mei 1996 yang lalu, saya telah mencanangkan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Pencanangan itu adalah untuk menggugah kesadaran kita terhadap tanggung jawab sosial dan kesetiakawanan sosial kita. Saya mengajak golongan masyarakat yang mampu agar mau mengulurkan tangan dalam membantu mereka yang lemah dan tidak mampu melalui Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Untuk menindaklanjuti Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, maka pada tanggal 20 Agustus 1996 yang lalu Pemerintah telah membentuk Lembaga Nasional Gerakan Orang Tua Asuh. Lembaga ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh hingga sampai ke daerah-daerah. Sebagai suatu kerja sosial, saya benar-benar berharap agar semua pihak yang terlibat dalam gerakan nasional ini bekerja secara tulus dan ikhlas semata-mata untuk membantu mereka yang lemah dan tidak mampu

(Pidato Presiden Soeharto, Sekretariat Negara 1966-1997. 1247).”

Presiden Soeharto mengharapkan agar Gerakan Orang Tua Asuh digalakkan lebih luas, karena semakin banyak pihak yang bersedia membiayai pendidikan anak-anak tak mampu, maka program wajib belajar akan lebih sukses. Diharapkan

pula oleh Kepala Negara agar gerakan orang tua asuh itu dilaksanakan secara spontan dan tidak menutup kemungkinan setiap orang menyalurkan keinginannya menjadi orang tua asuh melalui organisasi kemasyarakatan (Team Dokumentasi Presiden RI, 2003) dan gerakan ini dapat membantu anak-anak dari keluarga miskin untuk bisa melanjutkan sekolah. Karena melalui GN-OTA, pemerintah orde baru hendak menjadikan tradisi yang luhur tersebut semakin efektif demi menolong anak-anak yang tidak mampu.

Sebagai sebuah lembaga pelayanan masyarakat yang bersifat sosial kemasyarakatan, independen, koordinatif dan transparan sebagai wadah kepedulian dan partisipasi masyarakat selaku orang tua asuh dalam rangka menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (---, 1997) Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau disingkat LGN-OTA menganut prinsip kerja gotong-royong, kebersamaan dan membagi habis pekerjaan, bersifat sosial kemasyarakatan, independen, koordinatif dan transparan sebagai wadah kepedulian dan partisipasi masyarakat selaku orang tua asuh dalam rangka menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 34/HUK/1996, Nomor 88 Tahun 1996, Nomor 0129/U/1996, Nomor 195 Tahun 1996. GN-OTA mempunyai peran khususnya dalam program yang berkaitan dengan pendidikan, kesejahteraan anak, serta pengentasan kemiskinan. Untuk itu GN-OTA memiliki dua kelompok sasaran, yakni sasaran langsung ditunjukkan kepada masyarakat yang mampu untuk menjadi orang tua asuh (OTA) secara perorangan, keluarga atau kelompok baik yang berada di dalam negeri maupun luar

negeri, organisasi / lembaga / badan / kelompok sosial masyarakat yang menyelenggarakan program bantuan anak asuh, lembaga / instansi pemerintah, dan badan usaha milik negara / swasta baik selaku perusahaan maupun karyawan. Sasaran tidak langsung ditujukan kepada anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu yang memiliki kriteria anak usia sekolah, termasuk anak cacat, anak dari keluarga tidak mampu (keluarga pra sejahtera I), anak yang tinggal di daerah terpencil, termasuk anak dari masyarakat terasing, mereka adalah anak-anak yang rawan putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar 9 tahun, anak usia sekolah yang kemungkinan belum mengikuti pendidikan dasar, atau anak yang putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar. Masyarakat Indonesia yang berperan dalam menyukseskan gerakan ini dapat menjadi calon orang tua asuh (C-OTA) untuk menjadi orang tua asuh (OTA) yang memberikan bantuan kepada anak asuh usia sekolah dari keluarga tidak mampu agar dapat mengikuti pendidikan dasar 9 tahun sampai tamat (--, 1997).

LGN-OTA sebagai lembaga yang berperan dalam memasyarakatkan gerakan nasional orang tua asuh dan menghimpun data calon orang tua asuh, orang tua asuh, identitas anak asuh dan calon anak asuh, sehingga perlu melakukan upaya-upaya seperti penyuluhan sosial tertulis dan lisan, yaitu dengan penyampaian informasi secara tertulis melalui penerbitan leaflet, booklet, pamflet, brosur, spanduk atau media cetak lainnya tentang gerakan nasional orang tua asuh. Kemudian melakukan penyuluhan lisan, baik secara tatap muka dengan masyarakat langsung, maupun tidak langsung (melalui media elektronik) melalui jalur keluarga, pemuka masyarakat (pengurus/anggota organisasi/lembaga/badan sosial), jalur

keagamaan (sasaran pemuka agama), pendidikan (guru/dosen/lingkungan sekolah) dan jalur kedinasan (PNS/ABRI/BUMN). LGN-OTA memiliki beberapa program kerja yang nantinya membantu LGN-OTA mencapai tujuan dalam setiap periodenya, namun pada tahun 1999 LGN-OTA mengalami perubahan pada tanggal 10 November 1999, lembaga GN-OTA ditingkatkan dan dilegalisasikan menjadi sebuah yayasan Latar belakang peningkatan status hukum Lembaga GN-OTA menjadi Yayasan Lembaga GN-OTA adalah kebijaksanaan pemerintah yang lebih memberikan kesempatan dan mendorong peranserta masyarakat yang sebesar-besarnya dalam penanggulangan masalah sosial. Hal ini dikarenakan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan jumlah orang tua asuh (OTA) yang memberikan bantuan berkurang, sementara jumlah calon anak asuh (CAA) yang memerlukan bantuan makin meningkat. Sifat Yayasan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (YLGN-OTA) adalah independen dalam artian yayasan ini berdiri sendiri, koordimatif yang merupakan wadah koordinasi dalam hal perhimpunan data dan pelayanan informasi yang berkaitan dengan GN-OTA, transparant karena bersifat keterbukaan, baik mengenai kegiatan maupun pertanggung-jawaban keuangan organisasi.

Melihat gambaran dasar pemikiran diatas tujuan penelitian saya adalah untuk melihat bagaimana keseriusan yayasan GN-OTA dalam membantu menyukseskan gerakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun khususnya pada wilayah DKI Jakarta, serta bagaimana perkembangan GN-OTA dan yayasan GN-OTA dalam membantu anak-anak usia sekolah menuntaskan pendidikan dasarnya. Penelitian ini juga saya buat karena belum adanya penelitian sejenis yang secara

lengkap merekonstruksi mengenai GN-OTA di wilayah Jakarta mengingat pentingnya peran Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) dalam mewujudkan atau menyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun menjadi alasan penulis mengambil tema ini.

Beberapa penelitian terkait mengenai Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) adalah penelitian skripsi dengan judul Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2007-2010) yang ditulis oleh Fahmi Al-Asari, yang memuat tentang kondisi umum pendidikan di wilayah D.I Yogyakarta serta kesulitan-kesulitan yang di alami lembaga GN-OTA di wilayah D.I Yogyakarta dalam rangka melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saya adalah focus wilayah yang berada di DKI Jakarta dan tahun perkembangan yang saya ambil adalah tahun 1999 dimana dimulai setelah lembaga GNOTA ditingkatkan dan dilegalisasikan menjadi sebuah Yayasan sampai 2009 dan berakhir pada 2009 untuk melihat keberhasilan program gerakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dicanangkan berakhir pada tahun ajaran 2008/2009.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Fokus penelitian ini adalah mengenai Yayasan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh di wilayah Jakarta 1999-2009. Batasan tahun 1999 bermula saat pergantian LGN-OTA (Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh) menjadi sebuah Yayasan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) setelah tahun 1999 sudah ada

undang-undang yang mengatur tentang lembaga atau organisasi untuk menjadi yayasan maka dari itu LGN-OTA mendaftarkan diri menjadi sebuah yayasan berbadan hukum dan bermitra di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan baru muncul sejak terjadi otonomi daerah pada bulan agustus 1999, ada perubahan bahwa pemerintah daerah berhak mengatur dan mengelola keuangan sendiri, maka yayasan GN-OTA melakukan penyesuaian kebijakan dengan melepaskan cabang-cabang yang ada di daerah dan membuatnya hanya sebagai mitra bukan berada di bawah naungan yayasan GN-OTA. Akhir dari pada penelitian ini adalah pada tahun 2009, tepat 10 tahun yayasan GN-OTA berdiri dan bertepatan dengan target pencapaian pemerintah yang mengharapkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini selesai di tahun ajaran 2008/2009 serta adanya perubahan struktur kepengurusan sehingga saya memberhentikan penelitian ini pada periode 2009. Untuk itu saya selaku penulis ingin melihat bagaimana pemerintah, yayasan GN-OTA dan kontribusi masyarakat dalam meyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun selama kurun waktu tersebut.

2. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana perkembangan GN-OTA yang terjadi di wilayah DKI Jakarta dalam kurun waktu 1999-2009
- 2) Bagaimana kontribusi GN-OTA dalam membantu anak asuh menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di tahun 1999-2009.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui perkembangan GN-OTA di DKI Jakarta pada tahun 1999-2009
- 2) Mengetahui dampak yang di berikan Yayasan GN-OTA dalam membantu anak asuh mendapatkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tahun 1999-2009.

2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan penelitian ini :

1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan wawasan baru mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia serta bagaimana pemerintah dan masyarakat berperan serta dalam membantu menyukseskan gerakan wajib belajar 9 tahun dengan berkontribusi melalui Gerakan Nasional Orang Tua Asuh khususnya pada wilayah DKI Jakarta selama 1999-2009.

2) Secara Praktis

Penelitian ini sebagai bahan untuk pengayaan dalam pembelajaran dan perkuliahan baik tingkat sekolah maupun universitas dan juga merupakan sebagai bahan untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dan sarana sosialisasi akan adanya Gerakan Nasional Orang Tua Asuh.

D. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penulisan sejarah atau historis dalam bentuk Deskriptif-Naratif. Menurut Kuntowijoyo, metode historis adalah sebuah prosedur dalam menyusun detail yang telah disimpulkan dari dokumen-dokumen autentik menjadi sebuah tulisan yang memiliki hubungan. Terdapat lima tahapan historis menurut Kuntowijoyo, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi atau analisa dan yang terakhir adalah penulisan sejarah atau historiografi (Kuntowijoyo, 2005).

Pada tahap pertama, heuristik atau pengumpulan sumber. Sumber dikumpulkan dan dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder, seperti buku, artikel, surat kabar, peraturan perundang-undangan, majalah dan arsip-arsip lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh melalui Perpustakaan Nasional Salemba dan Perpustakaan Nasional Medan Merdeka atau melalui Arsip Nasional Republik Indonesia dan wawancara langsung pada pengurus yayasan GN-OTA pusat di Kuningan, Jakarta Selatan.

Pada tahap kedua, Verifikasi atau kritik sumber. Sumber yang telah didapatkan melalui tahap heuristik akan diverifikasi keasliannya dengan melihat aspek jenis media, tahun pembuatan media, penulis media, dan gaya penulisan media (untuk dokumen dan Koran), hubungan narasumber dengan topik, dan kredibilitas narasumber (untuk wawancara). Namun, penulis mendapatkan lebih

banyak data selain wawancara melalui website resmi yayasan GN-OTA pusat yang memuat data sejak tahun 1996 sampai saat ini (Kuntowijoyo, 1994).

Pada tahapan Ketiga, interpretasi atau penafsiran. Penulis melakukan penafsiran sumber yang telah didapatkan dan diverifikasi akan ditafsirkan oleh penulis dan dihubungkan dengan sumber-sumber lain.

Kemudian tahap Keempat, historiografi atau penulisan sejarah. Pada tahap ini, sumber-sumber sejarah yang telah diverifikasi dan diinterpretasikan akan ditulis secara sistematis, terstruktur, dan objektif. Penulisan sejarah ditulis sesuai dengan kebutuhan topik dan sesuai fakta yang didapat melalui sumber (M. Dien Madjid dan Johan Wahyudi, 2014)

2. Sumber Penelitian

Sumber-sumber yang digunakan untuk penelitian sejarah adalah sumber primer dan skunder. Sumber-sumber tersebut berupa artiker, jurnal, peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Sumber primer didapatkan dengan melakukan wawancara tokoh terkait penelitian ini. Penulis mewawancarai ibu N. Prastiwi selaku Bidang Fundraising yang telah bekerja bersama GN-OTA sejak tahun 1997, bapak Hermawan selaku Bidang sekretaris dan pusat data yang sudah bekerja di GN-OTA sejak tahun 1996, bapak Kusdaryanto, M selaku Bidang Penyaluran dan pusat data yang telah bekerja di GN-OTA sejak tahun 1996 dan ibu S. N.Napitupulu selaku Bidang Penyaluran dan program orang tua asuh (OTA) yang telah bekerja di GN-OTA sejak 1996. Untuk dokumen sezaman, penulis menggunakan dokumen berupa surat kabar koran Media

Indonesia dan majalah Tempo pada masa terkait yang diperoleh di Perpustakaan Nasional dan majalah terbitan GN-OTA, data anak asuh dan orang tua asuh yang diakses melalui website GN-OTA dan data usia kelompok belajar melalui Badan Pusat Statistika.

Sebagai sumber sekunder, penulis menggunakan beberapa buku umum maupun spesifik yang berhubungan dengan topik penelitian, beberapa jurnal yang salah satunya ditulis oleh Kementerian Sosial RI, buku-buku yang dikeluarkan oleh yayasan GN-OTA dan Sumber skripsi dari penelitian sebelumnya yang berjudul "Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2007-2010)." (2016) yang ditulis oleh Fahmi Al-Assari dan beberapa buku yang berkaitan dengan penelitian.

